BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Umat manusia terdiri dari makhluk hidup yang berjenis kelamin, yaitu pria dan wanita. Dalam kehidupan sosialnya, mereka akan bertemu satu sama lain. Sudah menjadi kodrat Allah SWT bahwa di antara mereka ada rasa suka. Ketika dua insan saling tertarik, maka akan tumbuh rasa sayang kemudian dapat diresmikan melalui pernikahan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa :

(1) "Setiap individu memiliki hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah."

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 29 ayat (1), menyatakan bahwa : “Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.” Jadi, umat Islam di Indonesia harus mengikuti hukum Islam, umat Kristen harus mengikuti hukum Kristen, dan umat Hindu harus mengikuti hukum Hindu. Setiap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Pasal 29 Undang – undang Dasar 1945. Pasal tersebut menegaskan bahwa semua ketentuan, termasuk mengenai perkawinan, harus mematuhi prinsip – prinsip ini.

Pernikahan merupakan suatu perjanjian yang sangat kuat yakni menaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan *mitssaqan ghalidzan* yaitu ibadah. Landasan hukum bagi pernikahan muslim ditemukan dalam kompilasi hukum Islam ini. (Prof. Dr. H. Ahmad Rofiq, 2015) Islam memandang pernikahan sebagai satu-satunya jalan yang sah dan dianjurkan untuk menuju perkawinan dan pembentukan keluarga. Islam memandang pernikahan sebagai perjanjian suci yang kuat dan abadi antara dua orang, yang menganugerahkan kepada mereka rasa cinta, kesenangan, keamanan, kedamaian, dan kasih sayang timbal balik yang telah dianugerahi oleh Allah SWT kepada hamba-hamba-Nya. (Ahmad Rofiq, 2003)

Undang-undang tentang perkawinan dan ruang lingkupnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (keluarga) yang bahagia, kekal, dan berdasarkan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan mewujudkan hubungan jasmani dan rohani antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri. (Saptosih Ismiati, 2020)

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa setiap individu yang belum mencapai usia 18 tahun, termasuk janin yang masih dalam kandungan, dianggap sebagai anak. Jika mereka menikah, maka itu dianggap sebagai perkawinan di bawah umur. Salah satu dari beberapa permasalahan perlindungan anak adalah perkawinan anak di bawah umur. Dalam hierarki sosial, perkawinan anak di bawah umur dipandang sebagai pengecualian karena umumnya menimbulkan berbagai masalah dan banyak perceraian. Berdasarkan paradigma ini, tindakan perkawinan anak di bawah umur perlu diawasi secara ketat di antara berbagai upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah anak terjebak dalam perkawinan dini. (Dr. Mardi Candra, 2018)

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga memuat langkah-langkah terkait pelaksanaan tugas dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara untuk menjamin hak-hak anak dan perlindungan terhadap anak. Berikut ini diatur dalam Pasal 52 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia:

- (1) Setiap anak memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dari orang tua, keluarga, masyarakat dan pemerintah.
- (2) Hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang diakui dan dilindungi oleh undang – undang demi kepentingan anak sejak masih dalam kandungan.

Kurangnya pengawasan dan penegakan hukum terhadap pernikahan dini membuat orang tua dan pihak lain mudah menikahkan anak-anak mereka saat mereka masih di bawah umur. Akibatnya, tidak jarang ditemukan anak-anak yang menikah di bawah usia enam belas tahun. Beberapa sumber lain juga menyebutkan bahwa perkawinan anak yang dilakukan pada usia di bawah umur dapat menyebabkan putus sekolah, sehingga anak-

anak tersebut kurang memperoleh pendidikan yang memadai. Contohnya, di Kabupaten Indramayu, tingkat pernikahan di bawah umur tercatat cukup tinggi.

Pernikahan dini didefinisikan sebagai pernikahan di mana tujuan persiapan finansial, mental, dan fisik belum dianggap optimal. Dlori mengatakan bahwa konsep tersebut lebih menekankan pada bagaimana orang yang menikah terlalu muda gagal mempersiapkan diri untuk pernikahan. Mereka dikatakan tidak memiliki persiapan finansial, mental, dan fisik yang diperlukan untuk pernikahan. (Muhammad M. Dlori, 2005)

Pernikahan dini, menurut Ramulyo, didefinisikan sebagai pernikahan yang terjadi saat seseorang masih remaja, belum remaja, atau baru berakhir remaja. Di Indonesia sendiri, Meskipun hukum secara tegas menentang pernikahan dini, tekanan dari orang tua, kesulitan ekonomi dan sosial, serta kehamilan di luar nikah seringkali menjadi penyebab utama terjadinya pernikahan dini. (Fadilah, 2021)

Untuk memiliki keturunan, setiap manusia membutuhkan pasangan hidup. Seorang pria dan seorang wanita menjadi suami istri melalui pernikahan, yaitu ikatan lahir dan batin dengan tujuan untuk menciptakan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal yang berpusat pada Tuhan Yang Maha Esa. Pernikahan merupakan peristiwa yang sakral. Ketika seseorang menikah, statusnya sebagai lajang, janda, atau duda berubah menjadi status menikah. Diharapkan dari hubungan perkawinan yang sedang dijalani akan lahir generasi baru yang lebih unggul dari generasi sebelumnya. Oleh karena itu, pasangan yang akan memasukinya harus melakukan persiapan yang matang, baik persiapan mental dan fisik maupun persiapan faktor sosial ekonomi lainnya.

Menurut Pasal 7 ayat (1) dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, penetapan usia perkawinan digunakan sebagai indikator kedewasaan yang diwajibkan untuk memenuhi syarat melakukan perkawinan. Di dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang – undang Nomor 16 Tahun 2019 yang merupakan perubahan dari Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974, menyatakan bahwa :

- (1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.

Usia minimal yang ditetapkan adalah 19 tahun bagi calon pengantin wanita maupun calon pengantin pria. Walaupun telah ada ketentuan usia minimal, masih terjadi pelanggaran dengan melakukan perkawinan di bawah usia yang ditentukan. Hal ini jelas melanggar prinsip dan persyaratan perkawinan. Berdasarkan Pasal 7 ayat (2) dan (3) Undang – undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan bahwa :

- (1) Jika terjadi pelanggaran terhadap ketentuan usia yang disebutkan dalam ayat (1) orang tua dari pihak laki – laki dan/atau pihak perempuan, jika ada alasan yang sangat mendesak, dapat mengajukan dispensasi ke pengadilan dengan melampirkan bukti pendukung yang cukup.
- (2) Pengadilan yang memberikan dispensasi sesuai dengan ayat (2) wajib mendengarkan pendapat dari kedua calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memberikan peluang untuk mendapatkan dispensasi melalui pengadilan untuk mengatasi penyimpangan tersebut. Pandangan bahwa Undang-Undang tersebut tidak sesuai dengan batasan usia menikah muncul dengan adanya aturan dispensasi ini. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dalam Pasal 10 menyebutkan bahwa perkawinan dianggap sah apabila dilakukan di hadapan petugas pencatat perkawinan dan disaksikan oleh dua orang. Proses perkawinan juga dilaksanakan sesuai dengan hukum agama dan kepercayaan masing-masing, karena setiap agama memiliki aturan yang harus dipatuhi dan tidak dapat diubah secara khusus. (H. Zaeni Asyhadie et al., 2020)

Pernikahan dini menimbulkan kekhawatiran karena kaitannya dengan kegagalan perkawinan, bahaya kesehatan bagi ibu selama kehamilan dini, dan kemungkinan ketidakcocokan mental dengan tuntutan menjadi orang tua. Status sosial ekonomi yang rendah dari suatu masyarakat tercermin dari rendahnya rata-rata usia pernikahan pertama dalam kelompok tersebut dan lebih cenderung menikah dini dan putus sekolah. Usia seseorang menjadi salah satu aspek untuk tingkat perilaku dan kesiapan tindakannya tentang pernikahan. Seperti yang dinyatakan dalam cuplikan berita berikut, salah satu

peristiwa yang menarik perhatian media adalah pernikahan yang terjadi di wilayah Indramayu pada usia muda atau sebelum mereka cukup umur : (Sudedi Rasmadi, 2023)

“Dalam kehidupan masyarakat pernikahan dibawah umur masih sering terjadi. Di kabupaten Indramayu angka pernikahan dibawah umur cukup tinggi. Pada tahun 2020 angka perkara dispensasi nikah 799 perkara, tahun 2021 mencapai angka 654 perkara, tahun 2022 sempat turun diangka 574 perkara, tahun 2023 kembali turun di angka 277 perkara. Angka dispensasi nikah atau menikah dibawah usia 19 tahun di Kabupaten Indramayu selama beberapa tahun belakang cukup menurun. Kabupaten Indramayu masih menduduki peringkat ketiga dari 27 daerah di Jawa Barat.”

Melihat Dari fenomena yang disebutkan di atas, kita dapat melihat bahwa masyarakat kurang memahami batas usia perkawinan. Pola asuh yang kurang tepat dapat membahayakan anak. Karena pernikahan dini memiliki dampak yang sangat merugikan, maka pemerintah desa berupaya semaksimal mungkin untuk mencegah terjadinya pernikahan dini. Penulis perlu melakukan penelitian lebih lanjut mengenai perlindungan hukum terhadap pernikahan dini. Penulis tertarik untuk menelitinya dalam bentuk skripsi yang berjudul berdasarkan latar belakang tersebut dan gagasan yang telah dibahas sebelumnya. **“UPAYA PENCEGAHAN PERNIKAHAN DINI DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN INDRAMAYU DI HUBUNGKAN DENGAN UNDANG – UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 ATAS PERUBAHAN UNDANG – UNDANG NO. 01 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan informasi latar belakang yang diberikan di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Bagaimanakah aturan hukum terhadap perkawinan dini di Kecamatan Indramayu?
2. Bagaimana implementasi perkawinan dini yang dilaksanakan di Kecamatan Indramayu?
3. Bagaimana upaya pencegahan perkawinan dini di Kecamatan Indramayu?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut, yang didasarkan pada uraian masalah di atas :

1. Untuk memahami dan mengetahui mengenai bagaimana aturan hukum terhadap pernikahan dini di Kecamatan Indramayu.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana implementasi pernikahan dini di Kecamatan Indramayu.
3. Untuk memahami dan mendeskripsikan bagaimana upaya pencegahan pernikahan dini di Kecamatan Indramayu.

D. Kegunaan Penelitian

Diharapkan bahwa penelitian ini akan menghasilkan kemajuan teoritis dan praktis :

1. Kegunaan Teoritis

Diharapkan penelitian ini akan menghasilkan sebuah publikasi ilmiah yang bernilai dan berwawasan luas, memberikan pencerahan mengenai kemajuan ilmu hukum pada umumnya dan hukum perdata pada khususnya.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat secara luas mengenai akibat hukum terhadap perkawinan usia dini, terutama bagi masyarakat di Kabupaten Indramayu, untuk mempertimbangkan kembali tingkat kematangan usia sebelum memutuskan untuk menikah.

E. Kerangka Pemikiran

Perkawinan merupakan suatu tindakan hukum yang erat kaitannya dengan prinsip dan nilai-nilai agama. Namun, karena adanya pluralisme agama di Indonesia, tidak mungkin untuk membuat hukum perkawinan hanya berdasarkan nilai-nilai agama tertentu sambil mengabaikan nilai-nilai agama lain. Tujuan perkawinan menurut hukum adalah untuk membentuk keluarga bahagia dan langgeng berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pasal 28D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “setiap orang berhak berkeluarga dan mempunyai keturunan melalui perkawinan yang sah”.

Penjelasan tentang Pasal 28D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “setiap orang berhak membentuk keluarga melalui perkawinan yang sah dan mempunyai anak.” Artinya, anak berhak memperoleh pendidikan agar dapat mengembangkan minat dan potensinya, sebagaimana tercantum dalam Pasal 9 ayat (1). Perkawinan di bawah umur adalah perkawinan antara orang yang belum berusia delapan belas (18) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan jika telah menikah. Di antara semua keinginan seseorang, dorongan seksual merupakan hal yang paling sulit dikendalikan dan dapat berujung pada perkawinan dini. (Dr. Mardi Candra, 2018)

Penjelasan pada Pasal 1 angka 1 Undang – undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa setiap individu yang belum mencapai usia 18 tahun, termasuk janin yang masih dalam kandungan, dianggap sebagai anak. Jika anak – anak tersebut menikah maka itu dianggap sebagai perkawinan di bawah umur. Salah satu dari beberapa permasalahan perlindungan anak adalah perkawinan anak di bawah umur.

Penjelasan pada Pasal 29 Undang-undang 1945 mengatur tentang hak beragama di Indonesia, yang mencakup dua ayat utama. Ayat pertama menyatakan bahwa negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa, sementara ayat kedua menjamin kemerdekaan setiap penduduk untuk memeluk agama dan beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Pasal 29 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan Pancasila, dengan sila pertama yang mengakui Ketuhanan Yang Maha Esa.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga menguraikan ketentuan hukum mengenai perkawinan anak. Salah satu bentuk pelanggaran HAM adalah perkawinan anak. Berikut ketentuan Pasal 1 Ayat 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia: “Anak adalah setiap orang yang belum menikah, yang berumur di bawah 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, untuk kepentingan.”

R. Sardjono menegaskan bahwa perkawinan merupakan ikatan rohani dan jasmani, yang merujuk kepada pasangan sebagai suami istri dalam pergaulan mereka dengan masyarakat luas, karena perkawinan bersifat sangat formal. Hasrat yang sungguh-sungguh untuk hidup berdampingan sebagai suami istri dengan tujuan untuk

menciptakan dan memelihara keluarga yang bahagia dan kekal diungkapkan dalam pemahaman tentang ikatan jasmani dan rohani antara suami istri yang dimaksud. (H. Zaeni Asyhadie et al., 2020)

Pernikahan dini terjadi ketika seorang anak atau remaja menikah sebelum mereka siap, baik secara emosional, kognitif, maupun finansial. Kurangnya pemahaman remaja tentang pernikahan, keluarga, dan penyelesaian konflik dapat mengakibatkan pertengkar dalam keluarga dan pernikahan yang tidak bahagia. Calon pengantin harus berusia minimal 19 tahun, menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Meskipun ada pembatasan yang dibatasi oleh Undang-Undang, pernikahan yang dilakukan sebelum usia dewasa tetap terjadi. Hal ini jelas bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan Pasal 7 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

Pernikahan usia dini berpotensi menyebabkan kegagalan dalam berumah tangga resiko kesehatan pada kehamilan usia muda, kurangnya kesiapan mental untuk menjalani pernikahan. Pernikahan usia dini adalah salah satu fenomena sosial yang terjadi dimasyarakat. Kurangnya pengetahuan membuat masyarakat kurang memahami batas usia perkawinan. Dalam penelitian ini, ada hubungan antara teori-teori yang berkaitan dengan pernikahan usia dini. Dasar konseptual bagi kerangka pemikiran penelitian ini dapat dijelaskan :

1. Pertama, menurut teori kesejahteraan keluarga menurut Soetjipto (1992), kesejahteraan keluarga adalah terciptanya keadaan yang harmonis, yaitu semua anggota keluarga mampu memenuhi kebutuhan fisik dan sosialnya tanpa menghadapi kendala yang berarti, serta mampu mengatasi kesulitan sebagai satu kesatuan untuk meningkatkan taraf hidup keluarga. Menurut teori ini, keluarga perlu membangun keluarga yang sejahtera. (Fitria et al., 2022)
2. Teori perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah suatu tindakan untuk melindungi atau memberikan hak – hak individu dan masyarakat secara keseluruhan. Perlindungan hukum bertujuan untuk memastikan bahwa setiap orang mempunyai akses yang adil terhadap keadilan, keamanan, dan perlakuan yang setara di bawah hukum. (Kornelis Antonius Ada Bediona et al., 2023)

3. Teori keadilan Pada kenyataannya, keadilan kumulatif yang didefinisikan oleh Adam Smith sebagai kesetaraan, keseimbangan, dan keharmonisan dalam hubungan antarpribadi merupakan satu-satunya definisi keadilan. Pada kenyataannya, konsep keadilan komutatif yang menyatakan bahwa negara harus menjaga imparialitas dan memperlakukan semua pihak secara adil mengarah pada hasil lebih lanjut berupa keadilan hukum. Menurut Smith, salah satu nilai fundamental yang dibutuhkan agar masyarakat yang stabil dan damai dapat terwujud adalah keadilan. Keadilan adalah fondasi bagi kehidupan sosial yang teratur dan damai. Dalam konteks pernikahan di bawah umur, ini berarti melindungi hak-hak anak untuk tidak dipaksa menikah sebelum mereka mencapai usia dewasa dan mampu membuat keputusan yang matang. (Fajrin et al., 2023)
4. Teori Jan Michiel Otto tentang kepastian hukum menyatakan bahwa keadilan hanya dapat dicapai melalui penegakan kepastian hukum yang terus-menerus. Lebih lanjut, Jan Michiel Otto menjelaskan bahwa hukum bawaan memiliki potensi untuk mencerminkan budaya masyarakat dan menetapkan norma-norma yang dapat menimbulkan kepastian hukum. Jika pandangan ini dapat dipercaya, kepastian hukum yang sebenarnya memerlukan kondisi keselarasan dengan warga negaranya yang memahami dan berorientasi pada sistem hukum negara. Teori Otto menekankan bahwa kebijakan pernikahan dini dapat dilihat sebagai upaya pemerintah untuk menjaga stabilitas dan ketertiban dalam masyarakat, Ini dapat dimaknai sebagai upaya untuk menghindari ketidakpastian sosial dan potensi konflik yang mungkin timbul jika anak-anak perempuan menikah pada usia yang dianggap tidak tepat. Otto melihat hukum sebagai sebuah proyek yang melibatkan penciptaan dan implementasi kebijakan publik yang bertujuan untuk mencapai perubahan sosial. (R. Soeroso, 2011)

F. Metode Penelitian

Peneliti menggunakan teknik penelitian saat mereka memiliki dan melaksanakan tindakan yang diperlukan untuk memperoleh informasi atau data, lalu menganalisis data tersebut. Metode dalam penelitian meliputi tindakan yang harus diambil, sumber informasi yang harus dikonsultasikan, jumlah waktu yang harus dihabiskan untuk meneliti, dan proses khusus yang harus diikuti untuk mengumpulkan dan menganalisis data.

1. Spesifikasi Penelitian

Penulis menggunakan parameter penelitian deskriptif analitis saat menulis proyek akhir ini. Ronny Hanitijo Soemitro menyatakan bahwa persyaratan penelitian yang memberikan deskripsi terperinci tentang peristiwa atau isu yang diteliti dikenal sebagai spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Selain menguraikan undang-undang positif yang relevan dan teori hukum yang sesuai, persyaratan penelitian deskriptif analitis merinci isu-isu yang akan menjadi subjek penelitian. (Soemitro, 1990)

2. Metode pendekatan

Pendekatan hukum normatif digunakan dalam penyusunan tugas akhir ini. Salah satu metode yang menggunakan fakta hukum sebagai landasan analisisnya adalah pendekatan hukum normatif. Kerangka teori, asas hukum, serta peraturan perundangundangan yang relevan menjadi bagian dari strategi ini. Sesuai dengan ketentuan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, metode ini bertujuan untuk (1) mengumpulkan data tentang upaya pencegahan perkawinan di bawah umur dan (2) mengkarakterisasi tantangan terhadap upaya tersebut-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019.

3. Tahap penelitian

Tahap penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penulis banyak mengkaji buku-buku dan artikel tentang penulisan hukum untuk keperluan penelitian ini. Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder dan primer. Fokus utama dari karya ini adalah landasan hukum yang fundamental, yaitu bahwa peraturan perundang-undangan merupakan salah satu bahan hukum fundamental yang diatur menurut tingkat hierarkinya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat. (Soemitro, 1990) Buku-buku yang ditulis oleh para ahli hukum terkemuka, artikel-artikel yang diterbitkan oleh para ahli hukum, dan karya-karya pustaka para ahli hukum lainnya merupakan sumber hukum sekunder yang memperkuat bahan-bahan utama dalam penelitian ini.

b. Penelitian Lapangan (*field research*)

Sumber kedua penulis mengumpulkan materi sesuai dengan kajian penulis dengan menggunakan metode penelitian langsung meliputi observasi, wawancara, pencatatan, dan pengumpulan data. Seperti yang dikatakan Sugiyono

pada tahun 2014? Wawancara merupakan prosedur tanya jawab lisan sepihak, wawancara terdiri dari narasumber yang mengajukan pertanyaan dan pewawancara menjawab pertanyaan tersebut. (Sugiyono, 2014)

4. Teknik pengumpul data

Alat pengumpulan data yang dilakukan sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan

Penelitian ini mengadopsi studi Kepustakaan dengan pendekatan kepustakaan untuk mengakses dasar pemikiran berupa tulisan atau pendapat dari para ahli. Selain itu, data juga diperoleh melalui informasi berupa peraturan dan ketentuan formal yang terdapat dalam naskah resmi. (Soemitro, 1990)

b. Studi Lapangan

Metode pembelajaran studi lapangan melibatkan penggunaan observasi, wawancara, pencatatan, dan pengumpulan data secara langsung dengan menggunakan pertanyaan yang telah direncanakan sebelumnya sebagai panduan.

5. Alat pengumpul data

Alat pengumpulan data yang dilakukan sebagai berikut:

a. Alat Pengumpulan Data Kepustakaan

Alat pengumpulan data kepustakaan yang digunakan buku catatan harian, pengetahuan ini dapat diperoleh melalui penelitian dan evaluasi bahan hukum primer dan sekunder yang relevan dengan topik penelitian.

b. Alat Pengumpulan Data Lapangan

Penelitian ini mengandalkan wawancara sebagai metode utama pengumpulan data lapangan. Kumpulan pertanyaan dan jawaban yang telah disusun.

6. Analisis data

Mirip dengan kriteria tertulis yang ditetapkan dan disetujui oleh organisasi atau badan resmi, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk analisis data dengan memilah-milah transkrip wawancara, gambar, atau rekaman audio.

Menurut Ronny Hanitijo Soemitro, analisis data merupakan suatu proses terstruktur yang melibatkan pengumpulan dan penyusunan data yang berasal dari catatan lapangan, wawancara, dan dokumentasi dengan cara sistematis. Tujuannya untuk membuat hasil penelitian yang dikumpulkan mudah dipahami oleh individu dan orang lain. (Soemitro, 1990)

7. Lokasi penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di lokasi yang relevan dengan topik yang dibahas. Lokasi tersebut dipilih karena berkaitan langsung dengan permasalahan yang menjadi fokus penelitian hukum ini.

1) Kepustakaan :

- a. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Jalan Lengkong Dalam Nomor 21 Bandung.
- b. UPT Perpustakaan Universitas Wiralodra, Karanganyar, Kec. Indramayu, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat 45213.

2) Instansi :

- a. Kantor Urusan Agama Kecamatan Indramayu, Jl. Wiralodra No.9/E, Lemahabang, Kec. Indramayu, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat.
- b. Pengadilan Agama, Jl. MT Haryono No. 2A, Sindang, Kec. Sindang, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat.